

**PENGELOLAAN DESA WISATA
DALAM PERSPEKTIF *COMMUNITY BASED TOURISM*
(Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah,
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)**

**Dimas Kurnia Purmada
Wilopo
Luchman Hakim**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
dimaspurmada@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe tourism management of Desa Wisata Gubug Klakah in the perspective of community based tourism. Field study was conducted at Gubug Klakah villages through interviews methods. Data analysis consist of data collection, data verification, data display, and conclusion. Furthermore, the results of this study are tourism management of Desa Wisata Gubugklakah does with some activities such as resource management, marketing, human resource management, and conflict management. Community based tourism was implemented through community involvement in preservation of natural resource and cultural resource, level of community participation, and income distribution. Therefore the level of community participation is on the highest level i.e. citizen control.

Keywords : Tourism Management of Desa Wisata, Community Based Tourism, and Society Participation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan Desa Wisata Gubug Klakah dalam perspektif *community based tourism*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilaksanakan kepada informan yang berkepentingan dalam pengelolaan Desa Wisata Gubug Klakah. Analisis data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen konflik. Penerapan *community based tourism* dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan tingkat partisipasi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan dalam puncak tertinggi yaitu *citizen control*.

Kata Kunci: Desa Wisata, *Community Based Tourism*, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Munculnya fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kritik atas pengelolaan wisata yang dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan dipandang kurang mampu memberdayakan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan pendekatan bottom-up, sedangkan pariwisata berkelanjutan mengedepankan pendekatan top-down. Pendekatan bottom-up mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pada pendekatan top-down, inisiatif berasal dari pemerintah (Baskoro, 2008:43). Penerapan pariwisata berbasis masyarakat dianggap mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka.

Pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat, tidak terjadi pada pariwisata konvensional yang memprioritaskan jumlah pengunjung dengan mengabaikan atau kurang memperhatikan partisipasi masyarakat lokal. Fenomena tersebut terjadi pula pada pengelolaan Coban Pelangi, Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Pengelolaan Coban Pelangi dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Malang yang menjadikan lokasi wisata ini sebagai mass tourism tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengembangan area wisata ini sebagai pariwisata masal memiliki beberapa potensi dampak negatif. Pertama, pembangunan fasilitas pariwisata yang merusak lingkungan. Kedua, terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat Desa Gubugklakah dan Perum Perhutani dimana masyarakat setempat menginginkan adanya aktivitas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dengan membatasi kunjungan wisatawan. Ketiga, pencemaran limbah pariwisata akibat

pembangunan fasilitas pariwisata. Pengembangan pariwisata masal ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Wisata Gubugklakah.

Masyarakat kemudian melakukan kritik atas pengelolaan pariwisata yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Malang. Kritik ini kemudian ditengahi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan menginisiasi pembentukan Desa Wisata Gubugklakah melalui pembentukan Ladesta (Lembaga Desa Wisata) Gubugklakah. Lembaga ini didirikan di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada tanggal 10 Agustus 2010 (Profil Desa Wisata Gubugklakah, 2014). Ladesta Gubugklakah memiliki tanggungjawab untuk menjadi pengelola Desa Wisata Gubugklakah. Ladesta Gubugklakah merupakan salah satu bentuk pengelolaan pariwisata yang mengedepankan masyarakat atau biasa disebut dengan *community based tourism*.

Pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah menghadapi beberapa tantangan, terutama tantangan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang sadar wisata. Pengelolaan Desa Wisata mengharuskan adanya sumberdaya yang trampil. Berdasarkan data monografi Desa Gubugklakah Tahun 2013 diketahui bahwa 96,8% penduduk desa Gubugklakah bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 2.360 orang, yaitu meliputi petani (55,4%) dan buruh tani (41,3%). Apabila dilihat dari aspek pendidikan, maka rata-rata pendidikan masyarakat hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Di Desa Gubugklakah penduduk yang menempuh pendidikan SD hingga SMA sebesar 77,3%, dimana pendidikan dasar sebesar 54,2%, SMP sebesar 19% dan SMA sebesar 4%. Tantangan tersebut mengharuskan adanya pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang sadar wisata.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan kajian tentang pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah yang mencoba melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pariwisata. Pada dasarnya pengelolaan wisata merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, maka pengelola wajib melakukan manajemen sumberdaya efektif (Priatna dan Diarta, 2009:89).

Penelitian ini memiliki tiga tujuan penting. Pertama adalah menggambarkan proses pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah. Kedua, mengetahui penerapan *community based tourism* di

Desa Wisata Gubugklakah dan yang ketiga adalah mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata dalam penelitian ini mengadopsi dari konsep yang dikembangkan Pitana dan Diarta (2009) yang dimulai dari pengelolaan sumberdaya pariwisata. Pengelolaan sumberdaya pariwisata merupakan Untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan maka pengelola wajib melakukan manajemen sumberdaya yang efektif. Manajemen sumberdaya digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan degradasi kualitas lingkungan.

Selanjutnya adalah pemasaran pariwisata. Inskeep (1991) mengemukakan bahwa pendekatan perencanaan pemasaran merefleksikan hubungan antara produk pariwisata dan pasar wisata. Selanjutnya dikemukakan bahwa strategi pemasaran pariwisata meliputi tiga elemen yaitu 1) diversifikasi pasar; 2) peningkatan mutu; dan 3) perpanjangan musim (kedatangan wisatawan). Dari kedua uraian pakar pariwisata tersebut dapat dikembangkan bahwa pemasaran destinasi merupakan upaya pemberdayaan semua unsur daya tarik yang tersedia dan merancang event yang dapat menarik wisatawan secara reguler dan berulang, selama bertahun-tahun.

Manajemen sumberdaya manusia pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk membuka kesempatan baru bagi orang-orang yang ingin bergabung dengan dunia pariwisata. Manajemen sumberdaya pariwisata dalam penelitian ini lebih pada bagaimana pengurus organisasi mengembangkan anggotanya agar menjadi tenaga terampil pariwisata.

Manajemen krisis dalam pariwisata merupakan komponen yang sangat esensial, tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi krisis tetapi juga untuk membatasi dampaknya terhadap organisasi, daerah tujuan wisata, maupun industri yang berhubungan dengannya Pitana dan Diarta (2009:97-98).

Community Based Tourism

Community Based Tourism merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pariwisata. Suansri (2003:12) mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan *Community Based Tourism*. Prinsip tersebut antara lain:

- a. Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
- b. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek
- c. Mengembangkan kebanggaan komunitas
- d. Mengembangkan kualitas hidup komunitas
- e. Menjamin keberlanjutan lingkungan
- f. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal
- g. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas
- h. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
- i. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas
- j. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan.

Sepuluh prinsip tersebut dapat disimpulkan kedalam beberapa prinsip pengelolaan *Community Based Tourism*. Pertama, prinsip keikutsertaan anggota komunitas kedalam setiap kegiatan pariwisata. Kedua, prinsip menjaga lingkungan hidup. Ketiga adalah prinsip kelestarian budaya. Keempat adalah prinsip pemerataan pendapatan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Gradasi peserta dapat digambarkan dalam gambar 2 sebagai sebuah tangga dengan delapan tingkatan yang menunjukkan peningkatan partisipasi tersebut (Arnstein, 1969:217).

- 1) Manipulasi (*Manipulation*)
- 2) Terapi (*Therapy*)
- 3) Informasi (*Information*)
- 4) Konsultasi (*Consultation*)
- 5) Penenteraman (*Placation*)
- 6) Kemitraan (*Partnership*)
- 7) Pelimpahan kekuasaan (*Delegated Power*)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Untuk membatasi lingkup studi penulis memfokuskan pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah pada pengelolaan sumberdaya pariwisata, pengelolaan pemasaran pariwisata, pengelolaan sumberdaya manusia dan manajemen konflik. Selain itu, peneliti juga menggambarkan studi implementasi CBT dengan melihat dari keikutsertaan anggota komunitas dalam kegiatan pariwisata, pelestarian alam dan budaya, dan pemerataan pendapatan di Desa Wisata Gubugklakah. Peneliti juga mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1969).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Gubugklakah. Untuk memperoleh data-data penelitian peneliti memwawancarai para pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah. Informan tersebut antara lain: perwakilan pengurus Ladesta Gubugklakah, Disbudpar Kabupate Malang, Pemerintah Desa Gubugklakah, dan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Gubugklakah. Peneliti juga melaksanakan observasi untuk mengamati proses penyelenggaraan pariwisata dan mengkonfirmasi data data penelitian yang bersumber dari wawancara. Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh dokumen-dokumen penting seperti peraturan perundang-undangan, profil desa dan lain sebagainya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1992) dalam Sugiono (2009). Tahapan tersebut antara lain (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan model triangulasi data yang terdiri dari triangulasi informan dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah

Pengelolaan Sumberdaya Pariwisata

Masyarakat Desa Wisata Gubugklakah menyadari bahwa alam merupakan kekayaan utama dari Desa Gubugklakah. Alam harus dijaga dan di rawat karena sebagian besar dari masyarakat Desa Gubugklakah hidup dari alam. Selain itu

masyarakat juga mengerti bahwa aktivitas pariwisata di desanya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itulah dilaksanakan beberapa upaya yang dilaksanakan masyarakat Desa Wisata Gubugklakah untuk menjaga dan melindungi alam.

Berdasarkan hasil penelitian upaya tersebut antara lain konservasi, pemanfaatan untuk berbagai kepentingan, zonasi dan kemitraan. Liu (1994:45) mengungkapkan terdapat beberapa karakteristik pengelolaan sumberdaya alam di suatu destinasi wisata. Karakteristik tersebut antarlain: (1) menggunakan sumberdaya terbarukan, (2) pemanfaatan untuk berbagai kepentingan, (3) daerah zona, dan (4) konservasi sumberdaya. Pengelolaan sumberdaya alam di Desa Wisata Gubugklakah belum sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh Liu (1994:45). Hal tersebut dapat dilihat dalam poin pertama yaitu menggunakan sumberdaya terbaharukan, kegiatan ini belum dilaksanakan di Desa Wisata Gubugklakah karena tidak semua masyarakat mengerti bahwa alam yang mereka nikmati saat ini harus dijaga dan dilindungi untuk diwariskan ke generasi berikutnya.

Destinasi Sumberdaya budaya dan event memiliki karakteristik yang sama dalam pengelolaannya. Destinasi Sumberdaya budaya yang ada di Desa Wisata Gubugklakah terdiri dari: Karawitan, Campur Sari, Al Banjari, Terbangun, Pencak Silat, Tayuban, Jaran kencak, Kuda Lumping, Bantengan, dan Wayang Topeng. Sedangkan event di Desa Wisata Gubugklakah terdiri dari upacara karo dan sadranan. Pengelolaan sumberdaya ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Local Working Gorup (LWG). Local Working Gorup (LWG) atau kelompok pekerja lokal adalah kelompok yang terbentuk atau sengaja dibentuk yang ada atau sudah ada di Desa Wisata Gubugklakah. Kelompok tersebut terbentuk berdasarkan minat-minat tertentu.

Pengelolaan pemasaran Pariwisata

Inskeep (1991) mengemukakan bahwa pendekatan perencanaan pemasaran merefleksikan hubungan antara produk pariwisata dan pasar wisata. Selanjutnya dikemukakan bahwa strategi pemasaran pariwisata meliputi tiga elemen yaitu 1) diversifikasi pasar; 2) peningkatan mutu; dan 3) perpanjangan musim (kedatangan wisatawan). Selain itu peneliti menemukan fakta bahwa di Desa Wisata Gubugklakah Ladesta juga melaksanakan Kemitraan kepada pemerintah dan travel agen untuk memasarkan Desa Wisata Gubugklakah. Berdasarkan pendapat tersebut terdapat beberapa

upaya yang dilaksanakan oleh Ladesta Gubugklakah untuk memasarkan Desa Wisata Gubugklakah.

Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Terdapat beberapa pengembangan sumberdaya manusia yang telah diikuti ataupun dilakukan oleh Ladesta Gubugklakah. Pengembangan tersebut antara lain: Pelatihan pertama adalah pelatihan bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh internal ladesta Gubugklakah. Pelatihan kedua adalah pelatihan yang bertemakan “Penguatan Kelompok Sadar Wisata di Jawa Timur”. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Pelatihan selanjutnya adalah pelatihan pembukuan dan pelatihan software. Software yang diperkenalkan pada kesempatan kali ini adalah software photoshop. Sedangkan pelatihan pembukuan yang dimaksud adalah pelatihan akuntansi dasar. Selain beberapa pelatihan diatas terdapat pula pelatihan homestay yang disampaikan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.

Dalam setiap pelatihan tidak semua anggota bisa mengikuti pelatihan. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan tempat, biaya, waktu dan kuota undangan. Untuk mengatasi permasalahan perbedaan kemampuan anggota dilaksanakanlah upgrading internal Ladesta Gubugklakah. Upgrading internal tersebut dilaksanakan oleh anggota Ladesta yang telah mengikuti pelatihan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk berbagi ilmu atau setidaknya pengalaman ketika mengikuti pelatihan.

Manajemen Krisis

Dalam beberapa kasus Ladesta Gubugklakah telah melaksanakan pendekatan manajemen risiko dalam menyelesaikan krisis. Pendekatan manajemen risiko merupakan teknik merespon krisis dan mengelola dampak krisis secara efektif dan efisien, serta terkonsentrasi pada penilaian dan pengendalian krisis sebelum krisis tersebut terjadi (Pitana dan Diarta, 2008:100). Teknik ini telah dilaksanakan Ladesta Gubugklakah untuk beberapa kasus misalnya kasus untuk mengatasi kecemburuan sosial akibat adanya desa wisata. Pada awal pembentukan desa wisata, Ladesta telah melaksanakan identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut kemudian mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Kemudian munculah kebijakan untuk menerapkan sistem rolling.

Untuk beberapa kasus lainnya Ladesta Gubugklakah masih menggunakan pendekatan manajemen tradisional.

Tradisional adalah upaya pengurangan risiko yang baru dilaksanakan ketika krisis terjadi (Pitana dan Diarta, 2009:100). Kasus yang terjadi misalnya kasus sampah. Pada kasus ini Ladesta masih belum mengetahui bagaimana mengelola sampah dengan tepat dan efisien. Kasus ini baru ditangani ketika sampah telah tertumpuk dan mulai menimbulkan masalah.

Penerapan *Community Based Tourism* di Desa Wisata Gubugklakah

Keikutsertaan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata

Partisipasi masyarakat Desa Wisata Gubugklakah dalam pengelolaan pariwisata dapat dilihat dari partisipasi pada saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan pengelolaan pariwisata merupakan aktivitas yang dilaksanakan masyarakat Desa Wisata Gubugklakah untuk melaksanakan pembuatan daftar pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota pada saat ada kegiatan pariwisata. Selain itu perencanaan pengelolaan pariwisata juga dapat dimaknai sebagai aktivitas sharing ide atau konsep untuk kemudian mendapat masukan dan mendapatkan dukungan untuk dilaksanakan dalam kegiatan pariwisata.

Perencanaan pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Gubugklakah dibagi menjadi dua. Pertama adalah perencanaan rutin dan kedua adalah perencanaan momentum. Perencanaan rutin dilaksanakan setiap bulan, sedangkan perencanaan momentum dilaksanakan setiap ada event wisata. Partisipasi dalam perencanaan pengelolaan desa wisata dapat dinilai dari dua hal. Pertama adalah kuantitas anggota yang hadir dan yang kedua adalah partisipasi untuk memberikan saran masukan pada saat proses perencanaan.

Dalam kedua dasar penilaian tersebut masyarakat Desa Wisata Gubugklakah menunjukkan partisipasi yang baik. Dalam setiap kegiatan perencanaan pengelolaan pariwisata hampir setiap masyarakat hadir, meskipun tidak dapat hadir masyarakat memberikan alasan yang jelas. Tingginya tingkat kehadiran tersebut disebabkan karena masyarakat menyadari bahwa kehadirannya baik aktif maupun pasif akan memberikan dampak terhadap pengelolaan pariwisata. Kehadiran yang aktif dapat dibuktikan dengan adanya masukan baik berupa kritikan ataupun saran terhadap suatu kegiatan. Kehadiran pasifpun juga tetap dihargai dalam pengelolaan pariwisata karena setidaknya Desa Wisata

Gubugklakah ini mendapat dukungan dan memiliki sumberdaya manusia yang besar.

Pelestarian Lingkungan Hidup

Kegiatan masyarakat Desa Wisata Gubugklakah dalam menjaga alam dilaksanakan melalui kegiatan kerja bakti dan pembuatan aturan berwisata. Dampak adanya kegiatan kerja bakti terhadap kelestarian lingkungan hidup adalah terjaganya kelestarian dan kerapian lingkungan di Desa Wisata Gubugklakah. Hal tersebut disebabkan karena dalam kegiatan kerja bakti dilaksanakan kegiatan penanaman dan pengaturan lingkungan misalnya merapikan tanaman, menebang pohon yang membahayakan, menanam pohon di lahan kosong dan lain sebagainya. Sementara itu dampak adanya pembuatan peraturan terhadap kelestarian lingkungan adalah adanya keteraturan perilaku wisatawan dan kemauan wisatawan untuk menjaga lingkungan.

Selain itu, perum Perhutani KPH Malang telah menerapkan zonasi area wisata yang terdiri dari area konservasi dan area pemanfaatan. Area pemanfaatan merupakan area yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pariwisata dengan aturan tertentu, sedangkan area konservasi merupakan area yang digunakan untuk menjaga kelestarian obyek wisata. Penerapan zonasi pada area wisata merupakan upaya untuk meminimalisasi dampak negatif akibat perilaku wisatawan (Pitana dan Diarta, 2009:90).

Pelestarian Budaya

Desa Wisata Gubugklakah memiliki berbagai macam potensi budaya. Potensi budaya yang paling utama adalah budaya keramahan dan kekeluargaan. Kedua budaya tersebut merupakan budaya yang memang ada sebelum adanya Desa Wisata Gubugklakah. Budaya tersebut jika dilestariakan dan diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada kenyamanan wisatawan sehingga wisatawan betah dan memiliki loyalitas terhadap Desa Wisata Gubugklakah.

Menyadari bahwa keramahan dan kekeluargaan adalah potensi yang harus dilestariakan maka Ladesta Gubugklakah menghimbau agar masyarakat setempat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan kedepan dalam pelestarian kedua budaya ini adalah generasi muda yang mulai meninggalkan budaya ini. Solusi yang sudah diterapkan adalah berupa himbauan tersebut.

Selain kedua budaya tersebut Desa Wisata Gubugklakah juga memiliki beberapa potensi lainnya. Potensi tersebut antara lain: Karawitan, Campur Sari, Al Banjari, Terbangun, Pencak Silat

, Tayuban, Jaran kacak, Kuda Lumping, Bantengan, dan Wayang Topeng. Beberapa kesenian tersebut dijaga dan dilestariakan dengan melaksanakan latihan rutin dan mendatangkan pelatihan dari luar. Selain itu dilaksanakan pula perekrutan anggota baru terutama untuk anggota muda agar kesenian tersebut dapat dinikmati sekarang dan di masa depan. Upaya tersebut juga diiringi dengan membentuk Divisi Budaya dalam struktur organisasi Ladesta Gubugklakah. Pembentukan divisi tersebut merupakan bukti bahwa Ladesta Gubugklakah berkomitmen tinggi untuk melestarikan setiap kebudayaan yang ada di Desa Wisata Gubugklakah.

Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Usaha untuk pemerataan pendapatan masyarakat di Desa Wisata Gubugklakah adalah dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ikut bergabung ke dalam Ladesta Gubugklakah. Dengan bergabung menjadi anggota Ladesta masyarakat bisa ikut serta untuk aktif terlibat di dalam setiap pengelolaan kegiatan wisata. Sebagai timbal baliknya masyarakat dapat menerima pembagian hasil akibat kerja kerasnya dalam membantu pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah.

Partisipasi terbanyak dalam aktivitas wisata di Desa Wisata Gubugklakah adalah pengelolaan homestay. Jumlah wisatawan yang berkunjung tentunya tidak sebanding dengan jumlah homestay yang tersedia. Untuk itu Ladesta Gubugklakah menerapkan sistem rolling agar setiap homestay mendapatkan giliran untuk dihuni oleh wisatawan. Selain upaya tersebut hal selanjutnya untuk mengurangi kecemburuan akibat pemerataan pendapat adalah dengan menerapkan transparansi penerimaan pendapatan dari wisatawan dan transparansi alokasi dana. Sebagian penerimaan juga digunakan untuk bantuan sosial bagi pembangunan masjid ataupun shodaqoh kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan CBT di Desa Wisata Gubugklakah telah memenuhi beberapa indikator yang dipaparkan oleh Suansri (2003:12). Dalam indikator mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata, Ladesta Gubugklakah telah berhasil menanamkan bahwa masyarakat telah merasa memiliki Desa Wisata Gubugklakah sehingga mereka akan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pariwisata sesuai dengan porsi masing-masing. Hal tersebut telah berhasil pula memenuhi indikator kedua yaitu

mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek. Keikutsertaan anggota kelompok merupakan sebuah hak yang telah di atur dalam AD ART Ladesta Gubugklakah.

Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Wisata Gubugklakah

Partisipasi masyarakat dapat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dapat didefinisikan sebagai aktifitas pembagian ulang kekuasaan yang adil antara Ladesta Gubugklakah dan masyarakat Desa Gubugklakah. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan (Arnstein 1969:217). Analisis tingkat partisipasi masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat Desa Wisata Gubugklakah ikut serta dalam pengelolaan desa wisata hal tersebut dapat digambarkan dengan melihat wewenang dan tanggung jawab. Tingkat partisipasi dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dapat dilihat dengan melihat ciri partisipasi masyarakat. Ciri-ciri tersebut antara lain:

- a. Adanya kesempatan seluas-luasnya yang diberikan Ladesta Gubugklakah kepada masyarakat Desa Gubugklakah untuk aktif dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah hal tersebut tertuang dalam AD/ART Gubugklakah.
- b. Komitmen tersebut mengindikasikan bahwa Ladesta Gubugklakah telah sadar akan pentingnya masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Komitmen tersebut secara tidak langsung menempatkan masyarakat sebagai pemegang control utama dalam pengelolaan Desa Wisata, sedangkan Ladesta adalah fasilitator untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
- c. Dalam perencanaan pengelolaan wisata masyarakat dilibatkan secara aktif dengan mengundangnya kedalam rapat pengelolaan wisata baik yang dilaksanakan rutin ataupun dilaksanakan secara incidental.
- d. Begitu pula dalam pelaksanaannya masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk memilih akan berpartisipasi dalam kegiatan guiding, kesenian ataupun pengelolaan homestay.

e. Sedangkan dalam evaluasi masyarakat Desa Gubugklakah ikut aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan baik berupa kritik ataupun saran untuk kebaikan pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah ke depan.

f. Adanya pembagian yang jelas antara hak dan kewajiban anggota Ladesta Gubugklakah. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam AD/ART Ladesta Gubugklakah. Kewajiban anggota Ladesta Gubugklakah adalah merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 2 AD/ART Ladesta Gubugklakah. Sementara itu hak anggota Ladesta Gubugklakah adalah kegiatan yang diterima oleh anggota setelah melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ladesta Gubugklakah.

Dengan melihat ciri-ciri tersebut peneliti menggolongkan partisipasi masyarakat Desa Gubugklakah dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah adalah partisipasi dalam tangga kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat (*Citizen Control*), dalam tingkat ini control masyarakat terjadi dalam segala aspek (Arnstein, 1969:217). Ciri dari adanya partisipasi dalam tangga kontrol masyarakat adalah adanya pembagian hak dan kewajiban, adanya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di dalam pengelolaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pengelolaan pemasaran pariwisata, pengelolaan sumberdaya manusia, dan manajemen krisis.
2. Penerapan *community based tourism* dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dapat dilihat melalui beberapa hal seperti memastikan keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan pariwisata, pelestarian alam dan budaya dan menjamin adanya pemerataan pendapatan masyarakat.
3. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkatan *citizen control*.

Saran

1. Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pariwisata, pada dasarnya masyarakat sangat aktif pada pelaksanaan namun kurang aktif pada saat perencanaan dan evaluasi.
2. Dalam pelaksanaan CBT setiap poin dalam indikator CBT telah berhasil terimplementasi dengan baik, selanjutnya langkah yang harus ditempuh untuk mengoptimalkan CBT adalah memastikan bahwa terjadi regenerasi dalam pelestarian budaya dan memastikan bahwa budaya yang ada saat ini dapat terwariskan dengan baik kepada karang taruna.
3. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang diharapkan mampu membantu akses permodalan dan akses pengembangan kapasitas masyarakat wisata di Desa Wisata Gubugklakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," *JAIP*, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
- Baskoro dan cecep Rukendi. 2008. Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol III (1):37-50.
- Inskip, E.1991. *Tourism Planning*. New York:Van Nostrand Reinhold
- Liu Juanita C. 1994. *Pacific Islands Ecotourism: A Public Policy and Planning Guide*. Hawai'i : The Pacific Business Center Program
- Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta:Andhi
- Profil Desa Wisata Gubugklakah 2014
- Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Rest Project.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cet. IX. Bandung: Alfabeta.